

BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER DALAM MEMBENTUK SIKAP/ WATAK KEWARGANEGARAAN SISWA (*CIVIC DISPOSITIONS*)

Camellia, Puspa Dianti

puspadianti20@yahoo.com liacamel47@yahoo.com

Abstract: *Students' moral values seem to be faded away. It raised a big question about existence of a civic education; does civic education have lost its functions to produce the good, smart, and able to participate in social life learner outcomes which also proud and love their motherland? It cannot be denied that the implementation of civic education's teaching process is all about cognitive values. Actually, civic education teaching process should provide some values which have roles in students' behaviors (affective). One of the indicators is having a civic disposition. That is why, the procurement of characters' values- based materials is very important to develop students' civic dispositions.*

Keywords : *characters' values- based materials, civic dispositions*

Abstrak: Lunturnya nilai-nilai moral peserta didik menimbulkan pertanyaan besar mengenai eksistensi mata pelajaran PPKn; Apakah PPKn telah kehilangan fungsi untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, cerdas, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pembelajaran matapelajaran PPKn masih syarat dengan muatan kognitif saja. Padahal sejatinya matapelajaran PPKn memuat nilai-nilai yang bermuara pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik (afektif). Salah satu kompetensinya adalah memiliki sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Dengan demikian, maka perlu diadakannya bahan ajar yang memuat nilai-nilai karakter untuk membentuk sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa.

Kata Kunci: Bahan Ajar PPKn, Sikap Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Belajar dan mengajar bagaikan dua sisi mata uang yang penting dan sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Belajar diperlukan manusia untuk menambah khasanah pengetahuannya dan sebagai modal dalam kehidupannya. "Belajar adalah mengkonstruksi pengetahuan, yang didalamnya seseorang (siswa) berusaha memahami pengalaman-pengalaman mereka, (Anderson & Krathwohl, 2010 : 98)".

Melalui proses belajar seorang individu akan memperoleh pengalaman batiniah yang luas, belajar merupakan suatu langkah efektif bagi seseorang untuk menambah pemahaman serta memperluas

wawasan dan pengetahuannya. Belajar adalah proses yang penting. Belajar dapat dilakukan dimana saja, namun belajar sebagai aktivitas pokok dalam pendidikan di sekolah tentunya tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan tetapi juga membutuhkan guru sebagai motivator, fasilitator dan tenaga pengajar.

Selain aktivitas belajar tersebut, yang juga tidak kalah pentingnya adalah aktivitas mengajar. Mengajar yang dimaksudkan disini bukan hanya sekedar sarana transfer ilmu pengetahuan saja, namun juga lebih kepada proses mendidik yaitu mencakup proses pembinaan karakter siswa sehingga tercapai kompetensi yang berkenaan dengan sikap (Afektif) siswa. Dengan kata lain (Sanjaya,

2011 : 14) “ Mengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan”. Sehingga di dalam proses mengajar itu sendiri terdapat kegiatan membimbing siswa kearah perkembangannya, melatih siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan yang ia punya, baik keterampilan intelektual, keterampilan untuk dapat berpikir kritis, kreatif dan inovatif serta dapat menentukan sikap dan memecahkan masalah terhadap persoalan yang ia hadapi.

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Bercermin pada amanat UU Sisdiknas tersebut maka dapat kita ketahui bahwa akhir dari proses pendidikan ini adalah pengembangan kecerdasan atau intelektual (aspek kognitif), pengembangan keterampilan (aspek psikomotorik) dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan sikap (aspek afektif). Dimana semua tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang mendukung satu dengan yang lain. Namun tentu saja kita tidak bisa menggantikan peran

guru sebagai fasilitator, motivator, dan moderator dalam proses belajar mengajar di kelas. “Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, (Sanjaya, 2011 : 1) “. Dan tentu saja kurangnya fasilitas (bahan ajar) yang mendorong siswa supaya dapat menentukan sikap terhadap suatu persoalan, maka disinilah peran guru yang sebenarnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkannya sebuah bahan ajar yang mampu membuat siswa dapat menentukan sikapnya sebagai seorang warga Negara. Seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat siswa serta tentu saja sesuai dengan taraf perkembangan siswa yang termasuk didalamnya adalah memanfaatkan berbagai media dan sumber pembelajaran, akan lebih baik lagi jika guru dapat membuat sendiri bahan ajar yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Hal ini berlaku bagi semua guru, jika ingin mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal termasuk guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bukanlah hal yang baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari istilah *civics* (1957/1962) berkenaan dengan pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi. Kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara (1968/1969), Pendidikan Kewarganegaraan, *civics*, dan hukum (1973), pendidikan moral pancasila (PMP) pada (1975/1984), PPKn (1994), PKN (2004/2012) dan sekarang PPKn (2013).

Pada dasarnya tujuan PPKn adalah meng-Indonesiakan bangsa Indonesia karena melalui PPKn diharapkan bangsa Indonesia ini dapat menjadi seorang warga negara yang

baik perilakunya, cerdas intelektualnya serta mengetahui kewajiban dan haknya sebagai warga Negara, selain itu mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan perannya dalam lingkup pendidikan maka PPKn ini adalah menyiapkan siswa yang baik, cerdas dan memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Menurut Maftuh (2009: 123) “Pendidikan kewarganegaraan menyiapkan siswa untuk menjadi warga Negara yang baik dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*knowledge*) yang berasal dari konsep dan teori berbagai disiplin ilmu, meyakini, mentransformasikan, dan mengamalkan nilai-nilai dan kebenaran yang menjadi pandangan hidup bangsa dan Negara (*virtues*) dan mampu menerapkan keterampilan berwarga Negara (*citizenship skill*). Bila kita cermati secara saksama, maka orientasi pembelajaran PPKn adalah pembentukan sikap kewarganegaraan siswa (*civic disposition*). Sebagaimana diatur Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2007 bahwa matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) memiliki dua aspek yang harus dinilai yaitu aspek kognitif dan aspek afektif siswa. Serta diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat (3) menyatakan bahwa “Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi peserta didik (penilaian domain afektif)”.

Dengan demikian, menjadi tugas seorang guru matapelajaran PPKn untuk membuat suatu bahan ajar yang berisikan nilai-nilai karakter sehingga dapat membentuk sikap kewarganegaraan siswa (*civic disposition*). Sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) dimaksud oleh Quigley, dkk (1991:11) adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang

berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

PEMBAHASAN

Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang pada akhirnya dapat membantu tercapainya tujuan kurikulum. Sehubungan dengan pengertian ini, maka bahan ajar dapat berupa bermacam-macam bentuk, diantaranya berupa :

- Bahancetak, (*handout*/buku/modul/Lembar Kerja Siswa atau LKS /brosur/leaflet/*wallchart*/foto/gambar/model/maket. Merupakan bahan Cetak (printed) yang merupakan sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi.
- Bahan audio, (kaset/piringan hitam/*compact disk*/radio), merupakan bahan ajar dengar (*program audio*) merupakan bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal radio secara langsung yang dapat didengar atau dimainkan oleh orang lain, seperti kaset, radio, piringan hitam, CD audio
- Bahan *audio visual* (bahan ajar pandang dengar) video/ film orang/nara sumber ahli bidang studi adalah pemanfaatan sinyal radio yang dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial seperti Video, film, CD film
- Bahan Ajar Interaktif (*interactive teaching material*) merupakan kombinasi dari beberapa media baik audio, gerak, grafik, gambar, animasi dan video yang dalam proses pembelajaran dimanfaatkan

atau diperlakukan untuk mengendalikan suatu perintah dalam proses pembelajaran. Seperti CD interaktif, film interaktif; tanya jawab/diskusi, selain itu dapat berupa Bahan Ajar Interaktif DiskusiLingkungan/ Pelajaran diluar kelas Praktek dari sebuah materi tertentu

Nilai-Nilai Karakter

Nilai adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Nilai juga merupakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. *The Oxford American Dictionary* dalam Maftuh (2009:65) “ Nilai sebagai *standard of principles considered valuable or important in life*” yang berarti bahwa nilai tersebut merupakan standar atau prinsip yang dipandang berharga atau penting dalam kehidupan. Saat ini kebutuhan kita terhadap nilai sangat tinggi dan penting terutama bagi anak-anak sekolah, baik ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, serta mahasiswa di perguruan tinggi. Sudah menjadi rahasia umum jika kebanyakan dari pelajar Indonesia ini sudah mulai melupakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupannya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan sebagian besar pelajar agaknya sudah mengabaikan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari pandangan

hidup bangsa yakni pancasila. Bahkan hal ini bukan saja menimpa pelajar di Indonesia saja namun hamper di semua Negara para pelajarnya seakan telah kehilangan nilai dan moral. Misalnya saja pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pelajar, pelajar yang berjudi maupun minum-minuman keras, tawuran antar pelajar dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa minimnya pemahaman dan pengetahuan siswa mengenai nilai-nilai karakter yang baik, yang mungkin salah satu penyebabnya adalah bahan ajar yang berbasis nilai-nilai karakter belum banyak diproduksi atau pembelajaran berdasarkan nilai-nilai belum secara maksimal dilakukan di sekolah. Matapelajaran PPKn sebagai salah satu matapelajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap kewarganegaraan yang baik maka perlu dengan baik memperhatikan dan memuat nilai-nilai karakter pada bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Bahan ajar berbasis nilai-nilai karakter tersebut hendaknya mampu membentuk sikap kewarganegaraan siswa (*civic disposition*). Karakter (Jaenudin, 2012 : 160) adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak .

Tabel 1: Nilai-Nilai Karakter Bangsa

NILAI	DESKRIPSI
1. Religious	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5. Tangguh/Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
8. Cerdas	Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif
9. Demokratis	Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
10. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan di dengar
11. Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bersikap, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
12. Cinta Tanah Air	Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi dan politik bangsa
13. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain
14. Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan berkerjasama dengan orang lain
15. Cinta Damai	Sikap, perkataan dan tindakan menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya
16. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya
17. Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
18. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
19. Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, social dan budaya) Negara dan Tuhan Yang Maha Esa

Sumber : (Jaenudin, 2012 : 162)

Nilai-nilai karakter bangsa tersebut harus ada dalam PPKn mulai dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Bahan ajar PPKn harus menyediakan ruang gerak demi terciptanya atau terwujudnya sikap kewarganegaraan siswa (*civic disposition*) melalui bahan ajar berbasis nilai-nilai karakter tersebut.

Sikap/ Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Domain afektif merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan domain kognitif dan domain psikomotorik. Karena itu, domain afektif sangat perlu untuk ditingkatkan. Domain afektif salah satunya berisikan sikap, maka dengan demikian

penting bagi kita untuk mengetahui sikap/watak kewarganegaraan yang harus kita miliki dan khususnya bagi seorang siswa.

Sikap/Watak Kewarganegaraan (*civic disposition*) dimaksud oleh Quigley, dkk (1991:11) adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, *civic diposition* mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni “*civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism,*

recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles” (Quigley, dkk, 1991:13-14). Maksud semua itu adalah kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Branson (1998:23) menegaskan bahwa civic disposition mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali ditegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan

yang dikuasai warga negara. Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York pada tahun 1994 mengungkapkan pentingnya watak kewarganegaraan dalam kata-kata yang sekarang menjadi amat populer “Liberty lies in the hearts of men and women; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it; no constitution, no law, no court can even do much to help it. While it lies there, it needs no constitution, no law, no court to save it” (Branson, 1998:12). Artinya, kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkan. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.

Menurut Bronson (1988 dalam Budimansyah, 2012:9) secara singkat sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang harus dimiliki warga negara adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota masyarakat yang independen

Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar menerima tanggung jawab bahkan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan egal sebagai anggota masyarakat.

- b. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik
Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, memberi nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Termasuk

pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, menggunakan hak pilih dalam pemilu, membayar pajak, menjadi saksi dipengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.

- c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu

Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, dan mengikuti aturan musyawarah mufakat dan prinsip mayoritas namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.

- d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
Karakter ini merupakan bentuk sadar informasi sebelum menentukan pilihan atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Juga membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan mengevaluasi kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan kewarganegaraan tertentu.

- e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat

Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaan terhadap nilai-nilai dan prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara yang damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana.

Dengan demikian, Watak, karakter atau sikap kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling mendasar (essensial) dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-lain.

Implementasi Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Nilai-Nilai Karakter dalam Membentuk Sikap/Watak Kewarganegaraan Siswa pada Pembelajaran

1. Tahap Perencanaan
 - a. Guru merancang bahan ajar berbasis nilai-nilai karakter seperti yang tersebut di atas, dengan memperhatikan tujuan pembentukan sikap/watak kewarganegaraan yang ingin dicapai, memperhatikan kompetensi siswa, menelaah kurikulum yang ada. (Telaah SK dan KD/KI)
 - b. Guru mendesain kisi-kisi bahan ajar, menetapkan tujuan yang akan dicapai serta memilih metode yang tepat dalam menyampaikan esensi dari bahan ajar yang berbasis nilai-nilai karakter guna mencapai sikap/watak kewarganegaraan siswa (mencantumkan nilai-nilai karakter pada tabel 1 untuk membentuk sikap kewarganegaraan siswa)
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Dilakukan uji keabsahan bahan ajar berbasis nilai-nilai karakter tersebut sebelum di uji cobakan kepada siswa. Misalnya dilakukan penilaian oleh ahli yang dianggap kompeten
 - b. Dilakukan uji coba kepada siswa guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan
 - c. Guru memilih bahan ajar yang sesuai untuk digunakan dan melakukan pengkondisian sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi siswa untuk memunculkan sikap

- kewarganegaraannya (*civic disposition*)
- d. Bahan ajar tersebut harus memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berpikir dan bersikap sebagaimana kedudukannya sebagai warga Negara meliputi kompetensi yang harus ia capai pada poin sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) misalnya memberikan kesempatan diskusi, mengajar teman, dan lain-lain.
 - e. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik yang kesulitan untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut maupun kesulitan menunjukkannya dalam perilaku mereka
3. Tahap Evaluasi
 - a. Hasil pengujian tersebut dijadikan bahan revisi/perbaiki kualitas bahan ajar berbasis nilai-nilai karakter dalam membentuk sikap kewarganegaraan siswa
 - b. Guru meminta pendapat siswa mengenai bahan ajar yang dirancang
 - c. Berbagai temuan yang didapat dalam proses perancangan tersebut dijadikan tolok ukur untuk merancang bahan ajar yang lebih baik lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai matapelajaran memiliki tujuan untuk menjadikan siswa sebagai seorang warga Negara yang baik, cerdas serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadikan PPKn sebagai mata pelajaran yang mengemban misi penting sebagai suatu pendidikan politik, pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan hukum

dimana semua misi tersebut akan bermuara pada sikap cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan, sebagaimana amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan kewarganegaraan menurut undang-undang di atas memuat kompetensi sikap warga Negara yaitu rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui PPKn meng-Indonesiakan peserta didik Indonesia. Hal inilah yang membuat bahan ajar berbasis nilai-nilai karakter bangsa menjadi penting dan dibutuhkan, karena dengan adanya bahan ajar tersebut, diharapkan dapat membentuk sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa sebagai salah satu kompetensi PPKn yang harus dimiliki siswa selain daripada pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan kepada para pengampuh mata pelajaran PPKn untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran PPKn. Para pendidik diharapkan tidak hanya mentransfer bidang kognitif tetapi juga menanamkan nilai-nilai baik warga negara yang salah satunya dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahan ajar yang kaya akan nilai karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.W & Krathwohl, D.R. 2010. *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asa Mandiri. (2006). *PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Asa Mandiri
- Asa Mandiri. (2006). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Asa Mandiri
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2007). *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan*

Kepribadian. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.

Jaenudin, R. 2012. *Pendidikan Budaya dan Karakter bangsa, serta Implementasinya dalam Pembelajaran*. Palembang : Jurnal Forum Sosial, IPS FKIP UNSRI

Maftuh, B. 2009. *Pendidikan Umum dan Pendidikan Nilai*. Bandung : SPS UPI

Quigley, C.N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C.F. (1991). *Civitas: A Frame Work for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.

Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Bandung: Kencana